

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI REALISASI SALAH SATU TUJUAN  
PROGRAM NAWACITA “MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN” DI  
KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016**

***ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT AS REALIZATION OF ONE OBJECTIVE  
OF THE PROGRAM NAWACITA "BUILDING INDONESIA FROM THE PERIPHERY" IN  
BENER DISTRICT PURWOREJO REGENCY YEAR 2016***

<sup>1)</sup>Ria Nurpuspita, <sup>2)</sup>Sudati Nur Sarfiah, <sup>3)</sup>Emma Dwi Ratnasari

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

**Abstrak**

Pemerintah menerapkan program *Village Fund* dalam rangka mengembangkan perekonomian di wilayah kecil. Alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan masyarakat di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan penguatan desa. masyarakat sebagai subyek pembangunan. Jadi dalam kajian ini, sebuah gelar riset adalah "analisa pengelolaan dana desa sebagai salah satu tujuan dari program Nawacita" gedung Indonesia dari pinggiran "di Kecamatan bener, Kabupaten Purworejo di 2016 ". Village Fund (DD) adalah dana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, infrastruktur kelembagaan dan desa yang dibutuhkan dan diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi manajemennya dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mendanai program atau kegiatan di bidang pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten bener, Kabupaten Purworejo. Kajian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui kontribusi dana desa terhadap pembangunan daerah pedesaan di Kecamatan bener, Kabupaten Purworejo. (2) untuk menganalisa penggunaan dana desa oleh pemerintah desa di Kecamatan bener, Kabupaten Purworejo. (3) untuk mengetahui hambatan dalam pembangunan pedesaan terkait dengan dana desa. Dengan hasil ini, upaya harus dilakukan khususnya bagi pemerintah desa di Kabupaten bener untuk lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Keywords: Village Fund (DD), program implementasi, Nawacita, pembangunan desa

**Abstract**

*The government implemented the Village Fund program in order to develop the economy of the small region. The allocation of village funds is expected to increase equitable development of village welfare through improving public services in the village, advancing the village economy, overcoming the development gap between villages and strengthening village communities as subjects of development. So in this study a research title is "Analysis of Village Fund Management as One of the Objectives of the Nawacita Program" Building Indonesia from the Outskirts "in the District of Bener, Purworejo Regency in 2016". Village Fund (DD) is a fund given to the Village Government to be used to improve community service facilities, institutional and village infrastructure needed and prioritized by the community, whose utilization and administration of management is carried out and can be accounted for by the Village Head. The priority of using Village Funds is to fund programs or activities in the field of rural development and empowerment*

*of rural communities. This research was conducted in Bener District, Purworejo Regency. This study aims to: (1) To find out the contribution of village funds to the development of rural areas in Bener sub-district, Purworejo district. (2) To analyze the use of village funds by the village government in Bener sub-district, Purworejo district. (3) To find out obstacles in rural development related to village funds. With this result, efforts must be made especially for village governments in Bener District to pay more attention to community involvement in managing Village Funds.*

*Keywords: Village Fund (DD), Program Implementation, Nawacita, village development*

## **PENDAHULUAN**

Data penduduk Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 56,7 persen penduduk bertempat tinggal di perdesaan dan 43,3 persen penduduk bertempat tinggal di perkotaan (BPS, 2015). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan sampai pada tahun 2017 mencapai 16,3 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan yaitu 10,3 juta jiwa. Sementara itu, jangkauan pelayanan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari memadai. Misalnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani oleh infrastruktur perpipaan air minum, sedangkan di perkotaan mencapai 32 persen; sementara itu, untuk pelayanan telekomunikasi, dari total 62.806 desa di Indonesia, sebanyak 43.000 desa masih belum memiliki fasilitas telekomunikasi.

Data juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer). Berdasarkan Susenas 2013, pangsa tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Kemendesa PDTT menargetkan paling sedikitnya mengentaskan 80 Kabupaten Tertinggal atau 18 Kabupaten Tertinggal untuk setiap tahunnya dari 122 Kabupaten Tertinggal yang ada saat ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015. Sebaran Kabupaten Tertinggal menurut wilayah diantaranya untuk wilayah Sumatera terdapat 11 Kabupaten Tertinggal, Jawa sebanyak 5 Kabupaten, Kalimantan ada 12 Kabupaten, Sulawesi sebanyak 18 Kabupaten, Nusa Tenggara terdapat 25 Kabupaten, Maluku sebanyak 25 Kabupaten dan Papua sebanyak 33 Kabupaten. Sampai saat ini sudah 17 kabupaten/daerah lepas dari daerah tertinggal. Dan 50 kabupaten/daerah lainnya berpotensi lepas dari ketertinggalan.

Kesejahteraan harus dihadirkan di semua kawasan, tak terkecuali di tengah

masyarakat perbatasan. Sejak dari awal, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mencanangkan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yaitu berupa sembilan agenda prioritas untuk Indonesia sebagai berikut : (1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. (4) Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya. (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Revolusi karakter bangsa dan (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan restorasi sosial Indonesia

Dalam rangka merealisasikan poin ketiga maka pemerintah melaksanakan program dengan desentralisasi asimetris yaitu penyerahan Dana Desa yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah secara asimetris menurun sampai ke desa. Perlu upaya kerjasama dari semua pihak, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dengan adanya keberpihakan kepada daerah tertinggal, setidaknya pada tiga bidang yaitu

bidang perencanaan, bidang penganggaran dan bidang pelaksanaan, diharapkan daerah tertinggal akan lepas dari ketertinggalan.

Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang mendapat Dana Desa. Adanya Program Dana Desa menjadi harapan baru bagi warga desa di kabupaten Purworejo. Purworejo merupakan kabupaten dengan Agrobisnis sebagai kebanggaannya. Purworejo juga merupakan kabupaten yang dilewati dalam jalur utama penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu sebagai jalur selatan. Maka dari itu dana investasi pada bidang agroteknologi dan pembangunan infrastruktur di kabupaten Purworejo diperlukan demi kemajuan ekonominya.

Berdasarkan analisis dan data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Tahun 2015, Sebanyak 59 desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo, ditetapkan masuk kategori miskin. Masih banyak desa-desa yang kawasannya berada di pelosok dengan akses jalan yang kurang baik. Sangat minim angkutan umum yang lewat sehingga menyusahakan akses warga untuk beraktifitas. Desa-desa di kabupaten Purworejo masih sangat membutuhkan campur tangan pemerintah untuk menentaskan kemiskinan dan mendongkrak pembangunan.

Dari 16 kecamatan yang ada di kabupaten Purworejo, terdapat tujuh Kecamatan yang masih patut mendapat perhatian dalam konteks kemiskinan yaitu kecamatan Kecamatan Bruno, Kecamatan

Kaligesing, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Bener, dan Kecamatan Banyuwirip. Berdasarkan kondisi desa miskin, maka 79 % desa di kecamatan ini adalah desa miskin. Berdasarkan kondisi keluarga miskin, maka jumlah keluarga miskin di kecamatan Bener masih relatif tinggi. Dapat dilihat juga bahwa nilai indeks pembangunan desa di Kabupaten Purworejo adalah yang terendah dengan nilai 60,93 dan berada dibawah rata-rata indeks pembangunan desa Jawa Tengah sebesar 64,83.

Dalam paradigma baru seiring dengan reformasi bidang ekonomi, pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara adil dan merata serta mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah atau pedesaan dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara vertikal keatas menuju tingkat nasional. Maka dari itu diharapkan Dana Desa mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di desa-desa yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat pentingnya dana desa untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan daerah pedesaan, serta tekad pemerintah yang kuat untuk melakukan pembangunan di desa-desa yang tertinggal yang mana program

tersebut telah berjalan selama hampir dua tahun. Program Dana Desa tersebut akan memberi efek positif bagi daerah jika penggunaanya tepat dan jelas untuk masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah analisis pengelolaan dana desa sebagai realisasi salah satu tujuan program Nawacita “Membangun Indonesia Dari Pinggiran” di kecamatan Bener kabupaten Purworejo tahun 2016.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua bentuk dan pendekatan penelitian, yaitu bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2010) dan Kuncoro (2011), penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya, sedangkan Penelitian kuantitatif merupakan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian data tersebut diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Sumber data berasal dari laporan keuangan di desa-desa kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016

### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa adalah besaran dana yang ditransfer ke pemerintah desa oleh pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.
2. Jumlah Penduduk Miskin
3. Pertumbuhan ekonomi desa

### **Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data**

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam

konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dan uji beda

## **HASIL          PENELITIAN          DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Dana Desa**

Dana Desa yang diterima oleh desa-desa di Kecamatan Bener pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Besaran Dana Desa yang diterima di masing-masing desa di kecamatan Bener Tahun 2016

No	Nama Desa	Besaran Dana Desa Yang diterima	Besaran Dana Desa Perubahan
1	Benowo	204.167.000	269.249.000
2	Kalitapas	99.975.000	258.870.000
3	Kaliwader	372.623.000	286.050.000
4	Kedungpucang	191.064.000	285.120.000
5	Sendangsari	251.298.000	279.225.000
6	Kaliboto	106.976.000	273.760.000
7	Kaliurip	128.580.000	270.727.000
8	Kedungloteng	120.122.000	261.123.000
9	Wadas	316.774.000	279.997.000
10	Cacabankidul	189.729.000	270.038.000
11	Cacabanlor	116.246.000	261.342.000
12	Pekacangan	203.339.000	274.246.000
13	Medono	168.726.000	266.785.000
14	Bleber	124.345.000	261.384.000
15	Bener	324.839.000	288.669.000
16	Karangsari	350.522.000	291.237.000
17	Guntur	593.630.000	314.017.000
18	Legetan	324.289.000	286.773.000
19	Ketosari	256.181.000	281.294.000
20	Kamijoro	228.726.000	275.272.000
21	Jati	260.488.000	278.669.000
22	Mayungsari	220.597.000	273.438.000
23	Kalijambe	219.617.000	296.796.000
24	Sukowuwuh	353.381.000	293.575.000
25	Limbangan	221.256.000	274.526.000
26	Nglaris	125.370.000	264.608.000
27	Sidomukti	145.200.000	264.946.000
28	Ngasinan	241.596.000	277.342.000
<b>Sekecamatan Bener</b>		<b>6.459.656.000</b>	<b>7.759.078.000</b>

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Kec. Bener (2016)

Dalam Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa ada dua macam besaran Dana Desa yang tercantum yaitu Besaran Dana Desa yang diterima dan Besaran Dana Desa Perubahan. Perlu diketahui bahwa Dana Desa diterima oleh Desa dibagi dalam tiga kuartal selama 1 tahun dengan proporsi 30%, 30% dan kuartal terakhir adalah 40%. Dana Kuartal pertama diberikan 30% dari Besaran Dana Desa yang ada dalam RAB, namun saat memasuki kuartal terakhir Dana Desa biasanya bertambah lebih dari 20% dikarenakan penyesuaian kebutuhan. Dana sisa pembangunan digunakan sebagai dana swadaya masyarakat.

Tabel 2. Proporsi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Bener

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	-	-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	7.144.559.022	92,08
3	Bidang Pembinaan Masyarat	154.405.652	1,99
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	453.906.063	5,85
<b>Jumlah</b>		<b>7.759.078.000</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Sekunder 2016*

Tabel 2 menunjukkan proporsi penggunaan Dana Desa. Dana Desa dalam pengelolaanya banyak dikucurkan ke bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta untuk pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di desa-desa wilayah kecamatan Bener rata rata sudah sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 100, dan PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70 persen dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetanggan dan Rukun Warga

Rata-rata desa menggunakan Dana Desa dengan lebih dari 90% Dana Desa yang diiterimanya untuk melakukan pembangunan Desa seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Desa berdasarkan jenis pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan Dana  
Desa

No	Jenis Pembangunan Fisik	Jumlah Desa
1	Pembangunan Jalan Utama Desa (Rabat Beton)	28
2	Pembangunan Jalan Dukuh	25
3	Pembangunan Jalan setapak RT	10
4	Pembangunan Sarana Prasaran Kesehatan	6
5	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	9
6	Pembangunan Irigasi Desa	14
7	Pembangunan fisik lain	3

*Sumber : Data Primer (diolah), 2016*

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan fisik yang umumnya dilakukan oleh desa menggunakan Dana Desa adalah pembangunan jalan utama Desa baru setelah itu pembangunan jalan dukuh dan pembangunan fisik lainnya.

Selain Pembangunan fisik, Dana Desa juga digunakan untuk pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat namun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa. pembinaan masyarakat yang dilakukan menggunakan Dana Desa serta jumlah desa yang melaksanakannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. Jumlah Desa berdasarkan jenis Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa

No	Jenis Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa
1	Bidang pembinaan Linmas	13
2	Pelatihan Kepemudaan Karang Taruna	26
3	Peningkatan kapasitas masyarakat des LPMD	20
4	Peningkatan kapasitas masyarakat desa PKK	15
5	Peningkatan kapasitas masyara[kat desa FKMP	11
6	Peningkatan kapasitas masyarakat desa PKD	16
7	Peningkatan kapasitas masyarakat desa BKB	12

*Sumber : Data Primer (diolah), 2016*

## 2. Manfaat Dana Desa

Telah dijelaskan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan Dana Desa lebih dari 90% Dana Desa digunakan untuk perbaikan jalan di rata-rata desa, pembangunan bendungan, jembatan dan lain-lain. Hasil perbaikan jalan dapat dilihat dari data jumlah jalan rusak sebelum adanya Dana Desa dan sesudah adanya Dana Desa di Kecamatan Bener dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Sarana Jalan Rusak di Kecamatan Bener

<b>Sarana</b>	<b>Sebelum Adanya</b>	<b>Setelah Adanya</b>
	<b>Dana Desa</b>	<b>Dana Desa</b>
	<b>Dana Desa</b>	<b>Dana Desa</b>
Jalan Poros Kecamatan	91000 m	65000 m
Jalan Lingkungan	78000 m	59800 m
Jalan Aspal	91000 m	46800 m
Jalan Tanah	91000 m	62400 m
Jalan Makadam	104000 m	52000 m

1.

*Sumber : Data Primer (diolah), 2018*

Dari tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa adanya perbaikan jalan sebagai realisasi salah satu tujuan pembangunan desa melalui Dana Desa membuahkan hasil nyata dari berkurangnya jumlah sarana jalan rusak di kecamatan Bener, kabupaten Purworejo.

Selain hasil di bidang infrastruktur, manfaat Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari berkurangnya jumlah keluarga miskin di Kecamatan Bener yaitu sebagai berikut :

Tabel 6 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Bener

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum ada Dana</b>	<b>Sesudah Ada Dana</b>
	<b>Desa (2014)</b>	<b>Desa (2016)</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	13.132	9.464
<b>Miskin (Jiwa)</b>		
<b>Penduduk Miskin (%)</b>	24,46	17,63

*Sumber : Data Sekunder, Pemerintah Kecamatan Bener (2016)*

Dari tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa adanya Dana Desa ini juga berpengaruh pada berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bener dari 24,46 % menjadi 17,63 % dari seluruh masyarakat Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Dana Desa juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa-desa kawasan kecamatan Bener. Pertumbuhan ekonomi desa dapat dilihat pada APBDesa. Dalam penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata adalah uji komparatif yang dilakukan pada satu sampel berpasangan yang saling berhubungan. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pertumbuhan ekonomi desa sebelum adanya Dana Desa (Tahun 2014) dan pertumbuhan ekonomi desa sesudah adanya Dana Desa (Tahun 2016). Sudah dijelaskan diawal bahwa Dana Desa mulai berjalan efektif Tahun 2015 di beberapa desa namun secara keseluruhan desa di kecamatan Bener melaksanakan pada tahun 2016.

Data diatas kemudian diolah dengan uji beda menggunakan aplikasi Ms. Excel 2007. Hipotesis uji beda dalam penelitian ini adalah  $H_0$  menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah adanya program Dana Desa ditolak dan  $H_a$  menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah adanya program Dana Desa diterima. Kriteria pengujian untuk  $H_0$  diterima apabila  $t$  hitung  $< t$  tabel atau prob.  $t$  hitung  $> 0,02$ , sedangkan  $H_0$  ditolak apabila  $t$  hitung  $> t$  tabel atau prob.  $t$  hitung  $< 0,02$ . Berikut tabel hasil uji beda:

Tabel 7 Tabel hasil uji beda rata-rata.

Probabilitas	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	df	$\alpha$	t tabel	Keterangan
0,02	28	28	27	0,05	2,05	Signifikan
mean x <sub>1</sub>	mean x <sub>2</sub>	mean x <sub>1</sub> - mean x <sub>2</sub>	Std. Deviasi		t hitung	
3,17	3,34	0,18	0,09		9,67	

Sumber : Output olah data

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar  $9,67 > t$  tabel  $2,05$  atau prob.  $t$  hitung  $0,02 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah adanya program Dana Desa diterima. Artinya, ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi desa-desa di Kecamatan Bener sesudah diberlakukannya

program Dana Desa pada tahun 2016. Penggalan potensi-potensi daerah perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan (Prakoso, 2019). Sejalan dengan penelitian tersebut, dapat diartikan bahwa dengan adanya suplemen berupa transfer dana desa diharapkan mampu mengembangkan potensi desa untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk kedepannya dalam jangka waktu tertentu, desa mampu mencukupi kebutuhan preferensi lokal dengan penerimaan asli desa dan desa lebih mandiri serta tidak tergantung pada dana transfer.

### **3. Hambatan Pembangunan Desa**

Hambatan suatu pembangunan desa akan bergantung pada kondisi desa masing-masing. Namun secara umum masing-masing desa mempunyai faktor penghambat yang sama yaitu sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana dan keadaan geografis desa tersebut. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponensumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program serta keadaan alam

## **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis di muka dapat ditarik disimpulkan bahwa secara teknis Desa-Desa di Kecamatan Bener sudah siap dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan desa sejalan dengan tujuan pemerintah pusat. Proses perencanaanya sudah terstruktur serta melibatkan masyarakat. Proses pelaksanaanya pun sudah sesuai dengan dasar hukum pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya yaitu digunakan minimal 70% untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Namun permasalahan yang ditemukan yaitu bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dan pengelolaan masih berfokus pada pembangunan fisik sekitar 90% dari dana yang diterima sehingga program-program pemberdayaan masyarakat belum memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat.

Dilihat secara fisik, masyarakat sudah dapat menikmati infrastruktur yang ada dan memudahkan untuk masyarakat beraktivitas. Secara kuantitatif dari hasil dan pembahasan manfaat Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melakukan uji beda juga dapat dilihat kontribusi positif Dana Desa sebagai modal pembangunan. Hal tersebut juga didukung dengan data mengenai berkurangnya jumlah penduduk miskin sebelum dan sesudah adanya Dana Desa. Namun semua itu kembali ke persepsi masyarakat bahwa mereka belum merasakan

manfaat Dana Desa terhadap kesejahteraannya. Walaupun angka kemiskinan turun namun masyarakat tidak mendapat tambahan pendapatan dari adanya program Dana Desa tersebut. Hal itu dapat terjadi karena masyarakat belum mengetahui mengenai pemanfaatan Dana Desa untuk kesejahteraan mereka. Presepsi tersebut sesuai dengan hasil kuisioner mengenai pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa.

Hambatan pembangunan terkait Dana Desa juga secara umum tidak banyak, hanya saja sosialisasi yang masih kurang serta manfaat bagi kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercukupi dalam jangka pendek ini. Namun secara jangka panjang adanya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik yang dilakukan dengan adanya Dana Desa pasti akan memberikan efek positif bagi desa karena dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi desa secara simultan maka akan melancarkan pembangunan desa kedepannya.

### **Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian dapat diberikan saran-saran guna memperbaiki ataupun menyempurnakan pengelolaan Dana Desa serta manfaatnya bagi pembangunan desa di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo di masa yang akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Dana Desa agar

masyarakat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam Pengelolaan Dana Desa baik dari segi pelaksanaan maupun pengawasan karena Dana Desa itu untuk masyarakat bukan untuk pemerintah desa. Ketegasan aparat desa agar benar-benar bertanggung jawab dengan tugasnya dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah di amanahkan.

2. Pemerintah desa juga harus lebih memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja yaitu dengan mengoptimalkan program-program pemberdayaan masyarakat.
3. Aparat pemerintah dan warga harus lebih bekerjasama dalam menjaga lingkungannya. Mencari solusi untuk menanggulangi atau mengurangi intensitas banjir atau longsor dengan lebih peduli terhadap kebersihan, kerapian dan kesehatan lingkungan di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang masih terhitung daerah pegunungan ini.

Dengan adanya saran tersebut diharapkan pembangunan desa melalui pengelolaan Dana Desa yang baik dan lebih maksimal baik dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan dengan pembuatan kebijakan atau dalam penyusunan program kerja dengan melihat kebutuhan desa serta

keinginan dari masyarakat. Sehingga tujuan dari adanya Dana Desa sesuai yang tercantum dalam Nawacita dapat tercapai dan dengan adanya Dana Desa benar-benar meningkatkan pembangunan masyarakat dari berbagai aspek baik dari masyarakat desa yang dapat bersaing dalam hal kemajuan dan pembangunan dengan desa lain maupun dalam kualitas masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Ameliana, dkk. 2017. "Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Tahun 2011-2014". *Jurnal. Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Ahmadi, A dan Uhbiyati, N. 2001. "Ilmu pendidikan". Jakarta: Rineka Cipta.
- Araujo, Juliana D., Bin Grace Li, Marcos Poplawski-Ribeiro, Luis-Felipe Zanna. 2015. "Current account norms in natural resource rich and capital scarce economies". *Journal of Economic Development: ELSEVIER*. Vol: 120 No: 144.
- Arikunto, Suharsimi.1993. "Manajemen". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, R. Dr. 1983. "Interaksi Desa-Kota". Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Baharim, Samsul. 2017. "Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna". *Skripsi*. Kendari: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Buku Pintar Dana Desa. 2015. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460>
- Fattah, Nanang. 2004. "Landasan Manajemen Pendidikan". Bandung : Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Fleisher, Belton. 2010. "Human capital, economic growth, and regional inequality in China". *Journal of Economic Development: ELSEVIER*. Vol: 92 No: 2.
- Haris, Dian Rasdiyanah, 2015. "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
- Hernowo, Basah. 2010. "Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan". Dalam [www. Bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. "Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan". Jakarta: Pustaka CIDESINDO.

- Ksoll, Christopher. 2016. "Impact of Village Savings and Loan Associations: Evidence from a cluster randomized trial". *Journal of Economic Development: ELSEVIER*. Vol: 120 No: 70-85.
- Mehrara, Mohsen. 2011. "Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality". *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No.7.
- Muljana, B.S. 2001. "Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V". Jakarta: UI-Press
- Muntah anah,Siti. "Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas". *jurnal ekonomi*.
- Peraturan Desa Bungi Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Prakoso, Jalu Aji dkk. 2019. "Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah". *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol. 4 (1): 87-100.
- Presbitero, Andrea F. 2016. "Too much and too fast? Public investment scaling-up and absorptive capacity". *Journal of Economic Development: ELSEVIER*. Vol: 120 No: 17.
- Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. "Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi". Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- iyani, Nunuk. 2016. "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)". *Skripsi*. Surakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan

Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saputra, I Wayan. 2016. "Effectiveness of Village Fund Allocation Fund Management In Lembean Village Kintamani Sub-district, Bangli District 2009-2014". *Jurnal ELSEVIER*.. Vol: 6 No: 1.

Setyoko, Paulus Israwan. 2011. "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)".

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulastri, Nova, 2016. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo.

Suparno, A.Suhaenah, 2001. "Membangun Kompetensi Belajar". Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.

Syapsan dan Dahlan Tampubolon. 2010. "Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Block Grant Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Kabupaten Kampar". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2010(2010).

Todaro, Michael P. 1998. "Ekonomi Pembangunan". Terjemahan Hais Munandar. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

Widjaja H. 2003. "Otonomi Desa". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada